

KAJIAN HISTORIOGRAFI TENTANG PENDUDUKAN JEPANG DI JAWA DALAM BUKU “KUASA JEPANG DI JAWA” KARYA AIKO KUROSAWA”

Candrika Dwi Putra^{1(*)}, Hendra Naldi²

^{1,2}Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

*candrikadwi4107@gmail.com

abstract

*This research is a historical historiographical study that discusses the Japanese occupation of Java in the book *The Power of Japan in Java* by Aiko Kurasawa. The purpose of this study is to describe how the Japanese occupation of Java, especially the description in the book *The Power of Japan in Java* by Aiko kurasawa. This study uses the first stage of the historical method, heuristics to find and collect information sources to get the right data. There is a library method at this stage, namely preparing research equipment, making a work bibliography, managing time, and making research notes. The second stage, is the criticism of sources both internal and external. The third stage is data analysis and interpretation. The fourth stage, is to describe the results of research in the form of scientific writing, namely articles. The results of this study illustrate that the Japanese occupation of Java was not just an occupation. The Japanese occupation is synonymous with mobilization and control, where Japan mobilizes and controls society by making regulations that bind the Javanese people. Propaganda was the most visible thing in the Japanese occupation of Java, Japan spread its propaganda through new media such as films, shows, and schools. In addition to these things, there is one Japanese policy that is still attached to the Javanese community, namely romusha, this is because the Javanese people are forced to work under Japanese pressure, causing a rebellion by the Javanese people.*

Keywords: mobilization, control, romusha, occupation, propaganda, rebellion

Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian historiografi tentang sejarah pendudukan Jepang di Jawa dalam karya Aiko Kurasawa yang berjudul *Kuasa Jepang di Jawa*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Aiko Kurasawa menggambarkan sejarah pendudukan Jepang di Jawa di dalam bukunya. Penelitian ini menggunakan metode Sejarah *Tahap pertama*, Heuristik mencari dan mengumpulkan sumber informasi untuk mendapatkan data yang tepat. Terdapat metode kepastakaan pada tahap ini yaitu mempersiapkan peralatan penelitian, membuat bibliografi Kerja, mengatur waktu, dan membuat catatan penelitian. *Tahap kedua*, ialah kritik sumber baik internal ataupun eksternal. *Tahap ketiga*, ialah analisis dan interpretasi data. *Tahap keempat*, ialah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah yaitu artikel. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pendudukan Jepang di Jawa tidak hanya sekedar pendudukan saja. Pendudukan Jepang identik dengan mobilisasi dan kontrol, di mana Jepang memobilisasi dan mengontrol masyarakat dengan membuat peraturan yang mengikat masyarakat Jawa. Propaganda adalah hal yang paling terlihat dalam pendudukan Jepang di Jawa, Jepang menyebarkan

propagandanya melalui media baru seperti film, pertunjukan, serta sekolah. Selain hal-hal tadi terdapat salah satu kebijakan Jepang yang masih melekat bagi masyarakat Jawa, yakni *romusha* hal ini dikarenakan masyarakat Jawa di paksa bekerja dibawah tekanan Jepang sehingga menyebabkan terjadinya pemberontakan oleh masyarakat Jawa.

Kata Kunci: *mobilisasi, kontrol, romusha, pendudukan, propaganda, pemberontakan*

PENDAHULUAN

Historiografi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *history* yang berarti sejarah dan *grafi* yang berarti deskripsi atau penulisan. (Badri Yatim, 1997, hlm 1) Penulisan sejarah adalah cara untuk merekonstruksi suatu gambaran masa lampau berdasarkan data yang telah diperoleh yang didahului dengan penelitian. (Hugiono dan P.K Poerwantana, 1992, hlm 25) Dalam sejarah historiografi adanya hubungan baik antar ilmu sejarah tersebut sangat tidak sepenuhnya berlaku. Namun demikian hakikat ilmu sejarah sangat perlu diketahui justru agar mengetahui bahwa ilmu sejarah mempunyai arti sendiri. (Kuntowijoyo, 1996, hlm 9) Sejarah merupakan pembelajaran yang tiada ujungnya, hal ini di dasari karena tiga unsur utama sejarah yakni manusia, ruang dan waktu. selagi terdapat ketiga hal tersebut sejarah akan terus berjalan sampai akhir hayat. Historiografi dalam ilmu sejarah merupakan titik puncak seluruh kegiatan penelitian sejarah. Dalam metodologi sejarah, historiografi merupakan bagian terakhir. Langkah terakhir, tetapi langkah terberat, karena di bidang ini letak tuntutan terberat bagi sejarah untuk membuktikan legitimasi dirinya sebagai suatu bentuk disiplin ilmiah. (W. Poespopronjo, 1987, hlm 1).

Historiografi mengenai pendudukan Jepang dalam buku “Kuasa Jepang di Jawa” karya Aiko Kurasawa ini penting untuk dikaji lebih dalam, karena buku ini sangat menggambarkan situasi yang telah terjadi di masyarakat Jawa. Terutama perlakuan Jepang terhadap masyarakat Jawa. Seperti, pada tahap awal ketika tenaga kerja *romusha* pada umumnya dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan swasta bagi pekerjaan produktif, mereka di anggap lebih kurang sama sebagai buruh tetap. Akan tetapi, setelah mereka mulai di pekerjakan langsung oleh penguasa militer Jepang untuk pembangunan pertahanan, mereka mulai di anggap lebih kurang sebagai buruh kuli paksaan. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm133).

Selain itu, hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti buku tersebut dengan pendekatan historiografi adalah latar belakang penulisnya. Aiko Kurosawa mendapat BA dan MA di Universitas Tokyo yang bergengsi. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm xix) Ketika mengambil kuliah di Departemen Hubungan Internasional Aiko mulai tertarik dengan pemerintahan militer Jepang di Indonesia, bahkan tesis BA dan Ma nya mengambil topik Pemberontakan Tentara PETA di Belitar dan Pertempuran Surabaya November 1945. Aiko kurosawa sempat menjadi ketua jurusan Indonesia pada 1981 di Universitas Setsuna (Osaka). (Aiko Kurasawa, 2015, hlm xx) Aiko Kurosawa mengakhiri karier akademisnya selaku “Guru Besar Sejarah Sosial- Ekonomi, Universitas Keio” secara resmi pada 2012. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm xxi). Alasannya lainnya yang membuat peneliti tertarik untuk

melanjutkan penelitian ini adalah kelengkapan sumber yang dimiliki Aiko Kurosawa. Selain itu belum ada penelitian yang mengkaji buku Aiko Kurasawa. Dalam penelitian historiografi, latar belakang seorang penulis bisa jadi sangat berpengaruh terhadap sudut pandang dari karya yang dihasilkannya. Selain itu dalam penulisan sejarah (Historiografi), *zeitgeist* berpengaruh besar terhadap karya yang dihasilkan. Penulisan karya sejarah dan sastra hampir semuanya dipengaruhi oleh *zeitgeist* pengarang dan kondisi sosial pada saat karya tersebut dibuat.

Buku Aiko Kurawa belum pernah diangkat dalam penelitian Historiografi sehingga Keterbaruan penelitian ini berangkat dari apa yang sudah ditulis oleh penulis sebelumnya, mengenai historiografi tentang Jepang. *Pertama* Skripsi yang berjudul *Jugun Ianfu* Masa Pendudukan Jepang dalam Dua Karya Novel: Studi Historiografi karya Juliandro Ilyas Saputra. Skripsi ini Mengkaji tentang realita kehidupan budak seks atau *jugun ianfu* masa pendudukan Jepang di asrama Telawang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (1942-1945). *Kedua* penelitian yang dilakukan Yasrina Ayu Berjudull Tindakan Kekerasan Jepang dalam Beberapa Novel Indonesia. Dalam penelitiannya ia menampilkan karya novel dalam bentuk beberapa tema kekerasan yang dialami oleh rakyat Indonesia dalam masa kependudukan Jepang (1942-1945). *Ketiga* skripsi oleh Francisca Elicabeth yang berjudul *Realita Jugun Ianfu* Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945 di Indonesia (Daerah Telawang Kalimantan Selatan), Dalam Penelitian ini Ia mengkaji tentang realita kehidupan *jugun ianfu* di Telawang , Banjarmasin yang merupakan *ianjo* atau rumah bordil terbesar di Indonesia pada masa itu.

Keempat skripsi oleh Eny Nopi Yanti yang berjudul *Pendudukan Jepang di Jawa Barat tahun 1942-1945*. Dalam penelitian disebutkan bahwa Jepang tertarik menguasai Jawa Barat karena secara politik Jawa Barat sebagai pusat pemerintahan, Jawa Barat juga sebagai pusat pertahanan militer Jepang di kepulauan Indonesia. Daerah-daerah di Jawa Barat banyak memiliki perkebunan kopi, teh dan tebu serta daerah persawahan yang sangat bermanfaat untuk bahan makanan bagi penduduk dan tentara-tentara Jepang. Jumlah penduduk Jawa Barat yang padat sangat baik untuk pemasaran barang-barang produksi Jepang. Sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan Jepang untuk mendukung kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya (*Dai Toa no Senso*). Hasil penelitian ini sangat membantu penulis karena adanya persamaan tentang pembahasan sejarah pendudukan Jepang di Jawa dan gambaran pendudukan yang terjadi di sana. Perbedaan penelitian penulis dengan berbagai penelitian diatas adalah penulis menggunakan buku yang berjudul "Kuasa Jepang di Jawa Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945". Penulis melihat bagaimana gambaran pendudukan Jepang di daerah Jawa melalui buku tersebut. Pokok kajian dari penelitian saya adalah bagaimanana gambaran pendudukan Jepang di melalui buku "Kuasa Jepang di Jawa Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945"

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam metode penelitian sejarah, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. tahap pengumpulan data (Louis Gottchalk, 1975, hlm. 32). Pengumpulan data dilakukan untuk data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan yakni mencari buku-buku yang membahas mengenai pendudukan Jepang di Jawa dan Aiko Kurasawa. Pada poses heuristik penulis juga menggunakan metode kepastakaan yakni mempersiapkan peralatan penelitian, membuat bibliografi Kerja, mengatur waktu, dan membuat catatan penelitian. Selain itu penulis juga melihat video wawancara aiko Kurasawa melalui Youtube dan mencatat bagian-bagian yang menurut penulis penting.

Tahap kritik Sumber Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta. Kritik yang dilakukan berupa kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah menilai keakuratan sumber, sedangkan kritik intern adalah menilai kredibilitas data dalam sumber. Lalu ihwal kritik intern, perlu penulis mendalami isi dari penarasian sebuah dokumen. Setelah kritik sumber, selanjutnya adalah melakukann penafsiran, mengurutkan secara kronologis agar menjadi suatu kerangka yang memberi gambaran apa yang akan dideskripsikan. Kerangka yang telah dirangkai, maka perlu pula penulis untuk menafsirkan dam mengkonstruksikannya menjadi masuk akal dari segi fakta dan harmonis, semuanya demi penjelasan yang tepat. Tahap terakhir adalah penulisan atau historiografi. Penulisan adalah puncak dari penelitian, bisa pula disebut sebagai langkah akhir yang dilakukan. Semua fakta yang telah diinterpretasi akan terangkai sempurna setelah penelitian ini dituliskan dan akan memiliki makna dalam bentuk laporan. (Sardiman AM. 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pendudukan Jepang dalam Buku Kuasa Jepang di Jawa Karya Aiko Kurasawa.

Sebuah Karya merupakan suatu bentuk dan pekerjaan seni kreatif yang objeknya ialah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. (Semi Atar, 1984, hlm 2) Karya sejarah juga memiliki makna serta tujuan, baik itu tujuan yang bersifat mengajak ataupun memberitahu terkait suatu peristiwa. Karya sejarah akan sangat bermakna jika kita baca dan kita pahami maksudnya. Makna yang dapat diambil adalah gambaran tentang bagaimana peristiwa tersebut terjadi didalam karya sejarah. Aiko Kurasawa merupakan seorang sejarawan Jepang yang sudah sangat lama meneliti tentang peristiwa pendudukan Jepang di Jawa maupun karya lainnya. Pendudukan Jepang di Jawa terjadi selama kurang lebih 1942-1945 dan merupakan salah satu kejadian yang sangat kelam yang pernah terjadi di pulau Jawa pada saat itu. Menggambarkan peristiwa pendudukan Jepang di Jawa masih sangat diperlukan karena banyak gambaran yang sampai saat ini belum terlihat terutama untuk para mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan sejarah. Selain hal itu akibat desakan dan serangan tidak terduga yang dilakukan oleh

sekutu membuat Kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang terhadap Indonesia sering berubah-ubah.

1. **Gambaran Pendudukan Jepang Bagian pertama**

Buku Kuasa Jepang di Jawa Karya aiko kurasawa pertama kali terbit dengan judul *Mobilisasi dan kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945* yang pertamakali terbit pada tahun 1993. Pada bagian pertama ini memiliki judul besar yakni Dampak Kebijakan Jepang terhadap desa yang terdiri dari 4 bab. Bab pertama berjudul transformasi pertanian, pecahnya perang dan juga pendudukan militer Jepang menjadi awal mula perubahan besar-besaran dalam struktur ekonomi di Jawa. Jepang menyerbu Jawa untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia semata-mata untuk kepentingan perang.

Kutipan 1

“Tujuan pokok penyerbuan Jepang ke Jawa, sebagaimana bagian-bagian lain hindia belanda, ialah mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi wilayah-wilayah jajahan ini. Pedesaan Jawa, dengan tanahnya yang subur dan penduduk yang banyak, di anggap mempunyai potensi yang luar biasa, dan Jepang berusaha mengeksploitasinya dengan seefisien mungkin melalui kontrol yang intensif atas pulau ini.”

“Jepang berusaha mengeksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam Jawa melalui kontrol dalam bahasa Jepang (*tosei*) yang artinya seluruh kegiatan ekonomi produksi, sirkulasi dan distribusi secara ketat dikontrol melalui peraturan-peraturan pemerintahan.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm xxvi-xxvii)

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa Akiko Kurasawa dalam bukunya ini menjelaskan bahwa Jepang menjadikan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mumpuni. Berbagai kegiatan ekonomi diatur demi kepentingan-kepentingan kekaisaran Jepang pada saat itu terutama untuk kepentingan perang. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk mendukung operasi-operasi militer Jepang. Selama perang terjadi banyak permasalahan salah satunya adalah terbatasnya pertukaran komoditas hanya terjadi dengan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Jepang.

Salah satu jenis tanaman yang menjadi fokus Jepang dalam meningkatkan hasil pertanian adalah jenis tanaman yang menunjang tekstil. Pada masa pemerintahan hindia belanda pemerintahan memasok kebutuhan tekstil melalui impor. Pada saat Jawa mulai dikuasai oleh Jepang, pemerintahan Jepang membatasi impor tekstil dan untuk memenuhi kebutuhan teksil, para petani diperintahkan untuk menanam tanaman-tanaman demi menunjang tekstil seperti: kapas, Rosela, sisal dan yute. Selain itu Jepang juga membatasi penanaman teh, kopi, dan tebu demi meningkatkan produksi tanaman-tanaman yang lebih penting. Masih dalam tujuan meningkatkan perekonomian dalam bidang pertanian, Jepang juga mengeluarkan slogan-slogan yang biasa pemerintah munculkan diberbagai media seperti surat kabar, teater dan masih banyak yang lainnya.

Kutipan 2

“Slogan “melipatgandakan Hasil” diulang terus-menerus oleh pemerintah dan sering muncul di surat kabar, penerbit lain, teater, dan film-film.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 8).



Gambar 1. Insinyur Pertanian Jepang membimbing pemuda Indonesia
Sumber: Buku Kuasa Jepang di Jawa Karya Aiko Kurasawa hlm 7

Berdasarkan kutipan Aiko Kurasawa dalam bukunya ini menjelaskan bahwa slogan melipatgandakan hasil bertujuan agar para petani mendapatkan dorongan secara nasional bagi peningkatan produksi padi. Slogan ini pun disebar di hampir semua media propaganda Jepang. Dengan adanya slogan ini pula para petani ditempatkan dibawah tekanan keras pemerintahan Jepang untuk memusatkan semua tenaga mereka bagi pelipatgandaan Hasil. Peningkatan produksi makanan pada saat itu juga menjadi salah satu fokus pemerintah. Berkaitan dengan slogan yang di jelaskan oleh Aiko Kurasawa, Deni Kharisma Sari dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa Propaganda yang dilakukan Jepang dalam meningkatkan produksi pangan yaitu dengan mengadakan perlombaan-perlombaan dalam bidang pertanian perlombaan ini dilakukan tiap keresidenan. (Denik kharisma Sari, Prof. Nawiyanto) Lebih lanjut Dalam buku ini Aiko Kurasawa juga menyebutkan salah satu program yang dikeluarkan pemerintah Jepang yaitu *Kinkyu Shokuryo Taisaku*.

Kutipan 3

“...Pemerintah mengundang suatu program yang disebut *Kinkyu Shokuryo Taisaku* (tindakan-tindakan mendesak mengenai bahan makanan). Di bawah program ini, peraturan pemerintahan dalam peningkatan produksi dipusatkan pada (a) pengenalan jenis padi baru, (b) inovasi teknik-teknik penanaman, (c) propaganda dan latihan yang ditunjukkan bagi petani”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 10)

Dalam kutipan diatas Aiko kurasawa menggambarkan bagaimana pemerintahan Jepang terus meningkatkan produksi mereka terutama bidang pertanian, banyak cara yang dilakukan Jepang dalam meningkatkan produksi. Salah satu yang paling penting adalah pengenalan jenis bibit baru dikalangan masyarakat pedesaan. hal ini dilakukan Jepang dikarenakan rendahnya produktivitas beras yang terjadi di Jawa. Selain memperkenalkan bibit baru Jepang juga mengajak para petani di Jawa untuk meningkatkan mutu beras di Jawa. Melalui stasiun percobaan para peneliti mencoba memperkenalkan jenis padi yang baru dan cocok untuk ekologi Indonesia.

Kutipan 4

“pemerintah juga berkeinginan keras untuk memperkenalkan jenis-jenis padi baru yang akan lebih cocok dengan kondisi ekologi Jawa. serangkaian percobaan dilakukan di Bogor, *Noki Shinkenjo* (Stasiun percobaan pertanian) oleh peneliti-peneliti Jepang di Indonesia.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 8)



Gambar 2. Proses pembuatan tanggul Neyama

Sumber: Buku Kuasa Jepang di Jawa Karya Aiko Kurasawa hlm 14

Jepang juga memperkenalkan teknik penanaman yang baru, yakni memindahkan bibit tanaman padi pada garis-garis lurus dengan jarak tanaman tertentu diantara bibit tersebut (larikan). Pada masa Hindia Belanda masyarakat Jawa menanam padi secara acak di sawah dan menurut peneliti Jepang hal itu merupakan penyebab rendahnya tingkat produktivitas padi di Jawa. Pemerintah Jepang memberlakukan teknik penanaman tersebut dengan mengirim beberapa orang spesial baik itu dari Jepang maupun dari Indonesia untuk mendemonstrasikannya secara langsung di tanah percobaan (*Shikenden*). Jepang juga memerintahkan masyarakat Jawa untuk menggunakan pupuk alam, karena pada masa perang pupuk kimia sangat langka untuk di dapatkan.

Kutipan 5

“karena kesulitan pupuk kimia yang tersedia masa perang, Jepang harus memerintahkan kepada petani untuk membuat pupuk sendiri. Salah satu metode yang sangat di anjurkan adalah membuat pupuk kompos.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 14)

Berdasarkan kutipan ini Aiko Kurasawa menggambarkan bagaimana kesulitan para petani mendapatkan pupuk kimia ketika masa perang berlangsung. Pemerintah Jepang akhirnya memerintahkan para petani untuk membuat dan menggunakan pupuk Kompos agar tanaman padi memiliki kualitas. Pupuk kompos juga tergolong baru diperkenalkan pada masa pemerintahan Jepang. Hal ini dikarenakan pada masa Hindia Belanda masyarakat Jawa hanya menggunakan pupuk kandang dan pupuk abu, ketika masa pendudukan Jepang baru mulai memperkenalkan dan memopulerkann pupuk kompos. Masyarakat diminta untuk menggali tanah sedalam 1 meter di pekarangan rumahnya lalu membuat kompos di lubang tersebut dengan cara mengumpulkan dedaunan, sisa makanan dan kotoran hewan. Pada masa pendudukan Jepang, masyarakat Jawa juga tidak hanya tertekan terhadap peningkatan produksi, pemerintah Juga melakukan peningkatan dari segi infrastruktur serta perbaikan tanah. Beberapa peningkatan dari segi infrastruktur yang dilakukan Jepang adalah: Irigasi dan drainase, melakukann pembabatan hutan,serta pengalihan tanah.

Kutipan 6

“salah satu pekerjaan besar dalam pembangunan irigasi pada masa pendudukan Jepang ialah Selokan Yoshiro di Kesultanan Yogyakarta. Pembangunan di ,ulai pada 1943 dengan menggunakan banyak *Romusha* (buru paksa) yang diambil dari desa-desa tetangga, dan proyek tersebut diselesaikan setelah Jepang menyerah.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 12).

Kutipan 7

“sarana reklamasi penting lainnya adalah pembabatan hutan. Dalam *particuliere landerijen* (tanah partikelir) di Jawa Barat, misalnya masih terdapat hutan di daratan pantai yang diubah menjadi persawahan” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 14).



Gambar 3. Usaha memperluas lahan pertanian oleh anak-anak sekolah
Sumber: Buku Kuasa Jepang di Jawa Karya Aiko Kurasawa hlm 12

Kutipan 8

“di priangan 7 perkebunan teh (luas areal keseluruhan 4.708 hektar) dialihkan menjadi persawahan sejak November 1943, dan terutama di tanami oleh bekas buruh perkebunan, juga oleh anggota *seinendan* dan *dan keibodan* di wilayah-wilayah tetangga.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 16).

Berdasarkan kutipan dalam buku Aiko Kurasawa ini para petani mengalami tekanan dari banyak aspek tidak hanya di satu bidang saja. Pembuatan irigasi dan drainase juga menjadi tekanan yang dialami para Petani, pembuatan irigasi dan drainase ini dilakukan oleh Jepang sebagai upaya untuk mengaliri air menuju lahan persawahan, sedangkan pembabatan hutan sendiri dilakukan Jepang sebagai upaya memperluas lahan pertanian terutama persawahan. Perluasan ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman beras pada saat itu. Jepang juga mengalihkan beberapa tanaman seperti teh dan kopi ke lahan pertanian yang dianggap lebih diutamakan yakni padi. Banyak lahan teh dan kopi dialihkan menjadi persawahan sehingga menyebabkan turunnya produksi tanaman teh dan kopi itu sendiri. Selain kebijakan terhadap tanaman padi, pada masa pendudukan Jepang Kebijakan terhadap gula juga dikeluarkan di Jawa. Produksi gula mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini karena keluarnya peraturan terkait pengurangan produksi gula.

Kutipan 9

“pengurangan produksi gula diatur dan dijalankan pemerintahan militer dibawah rencana tunggal.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 52).

Kutipan 10

“menjelang 1945 produksinya hanya sebesar 84.245 ton dari produksi pada 1942 yang berjumlah 1.325.802 ton. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 55).

Berdasarkan kutipan Aiko Kurasawa diatas pada masa pendudukan Jepang, akibat dari terlalu memusatkan satu pertanian saja (Padi) menyebabkan pertanian disektor gula menjadi terbengkalai. Produksi gula turun hingga lebih dari 1.200.000 ton dalam kurun waktu 3 tahun masa pendudukan Jepang. pengurangan ini terjadi karena pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan yang merugikan sektor gula pada saat itu. peraturan tersebut mulai dikeluarkan oleh pemerintah Jepang (*gunseikan*) pada saat persediaan gula di Jawa di anggap sudah mencukupi. Demi menekan produksi gula pada saat itu rakyat dilarang menanam tebu dan memproduksi gula. Sedangkan pabrik-pabrik gula yang ada dialihkan fungsikan menjadi pabrik senjata.(Abdullah, T dan Lopian, A. B. 2012, hlm 48).

Bab kedua bagian pertama buku Aiko Kurasawa juga membahas mengenai kebijakan disektor pertanian, akan tetapi pada bab ini lebih fokus membahas mengenai kebijakan Jepang terhadap Wajib serah padi yang ditujukan untuk kontrol sepenuhnya atas pengumpulan dan distribusi barang. Hal ini terlihat jelas dari sistem “wajib serah” yang berarti mengharuskan petani untuk menyerahkan sebagian produksi mereka kepada pemerintah Jepang dengan harga yang lebih murah dari harga biasanya. Kebijakan Wajib

serah padi berawal ketika keluarnya dekret di masing-masing keresidenan dan setiap keresidenan di izinkan untuk menerapkan dekret tersebut sesuai kehendak mereka.

Kutipan 11

“wajib serah” padi secara resmi diawali dengan dikeluarkan dekret disetiap keresidenan dan masing-masing keresidenan diizinkan untuk menerapkan dekret tersebut sesuai kehendak mereka” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 82)



Gambar 4. Penyerahan padi oleh masyarakat

Sumber: Buku Kuasa Jepang di Jawa Karya Aiko Kurasawa hlm 84

Dari kutipan Aiko Kurasawa ini menjelaskan bagaimana awal mula dari sistem wajib serah padi yang berlangsung di Jawa. Akibat dari wajib serah padi ini setiap keresidenan di izinkan untuk menerapkan wajib serah padi di wilayah mereka masing-masing. Otonomi keresidenan ini merupakan salah satu ciri khas dari kebijakan pemasaran pada masa pemerintahan Jepang. Wajib serah padi yang dikeluarkan baru dimulai pada Oktober 1940. Pada tahun 1940 tersebut dikeluarkan sebuah peraturan untuk kontrol beras (*Beikoku Kanri Kisoku*).

Kutipan 12

“kalau seorang petani ditemukan menyimpan padi berlebihan surplus ini disita, standar kelebihan sangat kabur dan penilaian teegantung pada penyelidikannya.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 89).

Kutipan 13

“mereka menderita kemiskinan yang kronis dan hampir selalu terlibat hutang, serta terikat ijon. Dengan adanya ini mereka tidak memiliki kontrol penuh atas hasil mereka sendiri.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 114).



Gambar 5. Kekurangan Gizi Masyarakat

Sumber: Buku Kuasa Jepang di Jawa Karya Aiko Kurasawa hlm 117

Berdasarkan kutipan di buku Aiko Kurasawa, terlihat bahwasanya para petani mengalami tekanan yang sangat kuat dari pemerintah Jepang terkait kebijakan Wajib serah padi, banyak dari para petani mengalami kemiskinan akibat tidak ada padi yang bisa mereka simpan. Selain itu sering terjadi penyitaan oleh pemerintah terkait padi yang mereka simpan akibat dari ketidak jelasan padi yang bisa di simpan. Dengan kata lain para petani tidak mengetahui takaran berlebihan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga terkadang para petani yang menyimpan beras secara cukup bisa saja tetap disita oleh pemerintah. Dampak dari wajib serah beras membuat para petani mengalami kemiskinan dan penderitaan yang sangat berat. Pada masa sebelum pendudukan Jepang para petani menanam padi hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja dan hanya sedikit yang di jual kepasar, hal ini dikarenakan petani hanya menanam padi dala sepetak tanah yang tidak lebih dari 0,5 hektar. Tanah yang mereka gunakan pun bisa jadi tanah sewaan.

Pemerintahan Jepang akibat melihat situasi ini mengeluarkan upaya-upaya untuk meningkatkan pengumpulan beras. Upaya yang dilakukan pemerintah itu tidak semata-mata memperbaiki apa yang telah terjadi sebelumnya malah memeras lebih banyak para petani yang tidak memiliki cadangan padi untuk memenuhi permintaan pemerintah karena penderitaan mereka yang sudah berada di titik puncak. Bab ketiga pada bagian pertama buku Aiko Kurasawa membahas mengenai kebijakan tenaga kerja Jepang. Kebijakan tenaga kerja atau yang biasa kita kenal dengan *Romusha* menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Jawa. Hal ini terlihat disetiap wawancara yang dilakukan Aiko Kurasawa, di mana setiap masyarakat yang di tanya terkait mengenai pendudukan Jepang maka yang terlintas di pikiran hanyalah *Romusha*.

Kutipan 14

”apabila seorang Indonesia diminata untuk mengatakan satu faktor apa saja sebagai pengalaman paling mengerika selama pendudukan Jepang, mungkin dia akan menjawab “*Romusha*”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 131).

Berdasarkan kutipan ini, *Romusha* sangat membekas didalam diri para penduduk Jawa, kebijakan *romusha* ini juga merupakan suatu hal yang besar bagi pemerintah Jepang dan juga Indonesia. Melalui kebijakan ini banyak infrastruktur yang berhasil dibangun akan tetapi juga banyak menimbulkan korban jiwa. Tujuan Jepang membuat kebijakan terkait Tenaga kerja tidak lain adalah untuk kepentingan perang. Para pekerja di paksa membuat infrastruktur penunjang perang seperti Jalan, benteng, parit dan irigasi untuk pertanian. Para pekerja *romusha* dipaksa bekerja tidak hanya di daerah yang berdekatan akan tetapi juga di pekerjaan sesuai kebutuhan tenaga kerja oleh pemerintah Jepang. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Jawa maupun sumatera pindah dari tempat asal mereka menuju tempat mereka akan di tempatkan nantinya. Selain Masyarakat Indonesia banyak masyarakat negara lain yang juga ikut dalam kerja *romusha* ini, salah satunya ketika membangun rel kereta burma siam.

Kutipan 15

“romusha di paksa bekerja tidak hanya di daerah yang berdekatan, tetapi diangkat kemana pun sesuai tuntutan kebutuhan tenaga kerja oleh pihak Jepang”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 155).

Kutipan 16

“untuk pembangunan jalan kereta api burma siam ribuan tenaga kerja dimobilisasikan. Diantaranya terdapat 55.000 tawanan perang sekutu dan lebih 100.000 *romusha* Asia Tenggara yang meliputi orang Burma, Thai, Melayu, India, Cina, dan Jawa. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 157-158)



Gambar 6. Proses pembangunan Rel Kereta Burma-Siam
Sumber: Buku Kuasa Jepang di Jawa Karya Aiko Kurasawa hlm 158

Kutipan 17

“Romusha yang dikirim ke medan pertempuran di pasifik selatan lebih menderita. Meskipun jumlahnya tidak banyak.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 158)

Berdasarkan beberapa kutipan diatas, para *romusha* yang merupakan orang pribumi ikut di kirim ke luar Indonesia demi kebutuhan perang Jepang, salah satunya pembuatan rel di Burma. Burma yang saat itu di bawah pendudukan Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Sehingga masyarakat Indonesia tidak luput dari kebijakan Jepang ini. Selain itu berdasarkan Kutipan 17 Jepang mempekerjakan serta menurunkan para pekerja *romusha* hingga ke medan pertempuran di Asia Pasifik. Jumlah tenaga kerja *romusha* yang di pekerjakan di daerah pertempuran tidak terlalu banyak seperti yang terdapat di daerah Pendudukan akan tetapi kondisi para *romusha* yang di kirim ke medan pertempuran sangat memperhatikan melebihi romusha di daerah. Para pekerja romusha seharusnya mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi pada kenyataannya masih banyak para pekerja yang belum di bayar oleh pemerintah Jepang. Seharusnya upah yang di terima oleh para pekerja sebesar F0,50 per hari dan keluarga mendapatkan F 3,00 perbulan. Akibat dari kurangnya kemakmuran para *romusha*, para pemimpin nasionalis melakukann tekanan terhadap pemerintahan Jepang.

Kutipan 18

“Mereka (pemimpin nasionalis) melakukann tekanan terhadap militer untuk meningkatkan kehidupan *romusha*. Upaya nya adalah usulan pada sidang ke-4 Dewan pertimbangan pusat (*chuo sangiin*) pada Agustus 1944”.

Berdasarkan kutipan dalam buku ini, para pekerja *romusha* di gaji oleh pemerintah Jepang dan bahkan keluarga yang ditinggalkan oleh para *romusha* ke luar daerah juga ikut di gaji oleh pemerintah daerah. Akan tetapi ada satu hal yang membuat pembaca sedih terhadap gaji para *romusha* yakni, gaji para *romusha* di korupsi oleh para pemimpin daerah walaupun tidak semua daerah melakukannya. Hal ini juga yang menyebabkan para *romusha* hidup dalam kemiskinan dan kelaparan selama pendudukan Jepang. Dalam sidang yang dilakukan terbentuklah sebuah organisasi untuk menangani kesejahteraan umum *romusha* dan keluarganya, yang disebut Badan Pembantoe Pradjoerit Pekerdja (BP3). BP3 di terima oleh pemerintahan militer Jepang dan segera di laksanakan. Namun BP3 tidak berfungsi sebaik yang di diharapkan dan situasinya tidak banyak meningkat. Pemerintah militer Jepang melakukann beberapa langkah baru salah satunya ialah mengenai keputusan bahwa keluarga *romusha* yang di kirim ke luar pulau Jawa setiap bulan diberi tunjangan sebesar F. 10.000 oleh *Romu Kyokai* dan keluarga yang di kirim ke keresidenan lain di Jawa akan di beri F. 3,00. Selain itu rumah para pekerja akan diberi tanda.

Kutipan 19

“selain itu, diputuskan bahwa sebuah tanda yang menunjukkan “rumah prajurit pekerja” akan dibagikan oleh pemerintah setempat kepada keluarga

romusha. Tanda serupa yang telah dikeluarkan untuk keluarga PETA dan *heiho*.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 170)

Dalam kutipan ini, tempat tinggal para *romusha* di berikan label untuk menunjukkan bahwa mereka adalah para pekerja dan hal ini bertujuan untuk mempermudah penyaluran gaji yang di berikan oleh pemerintah nantinya. Dibalik upaya menangani kondisi pekerja Jepang juga melakukann upaya-upaya demi keberhasilan mobilisasinya, Jepang membuat sebuah prinsip resmi bahwa *romusha* harus di daftarkan semata-mata atas keinginannya sendiri, akan tetapi masalah terbesar dari Jepang ini sendiri ialah bagaimanaa mereka megumpulkan tenaga kerja secukupnya untuk memenuhi permintaan dari wilayah-wilayah yang berdekatan. Dalam hal ini terbentuklah *Romu Kyokai* (perhimpunan Urusan Buruh) yang di bentuk disetiap keresidenan. *Romu Kyokai* umumnya bertugas mengumpulkan daftar kaum *romusha*. Jepang juga melakukann latihan terhadap *romusha* untuk meningkatkan mutu mereka.

Kutipan 20

“disamping mendorong tenaga kerja *romusha* dan menigkatkan semangat kerja, Jepang juga memberi perhatian pada tenaga kerja terdaftar dan disini juga Jepang menerapkan sistem “latihan”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 187)

Berdasarkan kutipan ini terdapat tujuan khusus yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang dalam melatih para *romusha*. Terkait dengan tujuan dari latihan dalam hasil wawancaranya kegiatan latihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperkuat tenaga kerja serta untuk mempertahankan kesehatan spiritual dan fisik para *romusha* . selain itu tujuan lain dari latihan para *romusha* ialah untuk memperlancar mobilisasi Jepang di Jawa itu sendiri.

Bab terakhir atau bab ke 4 pada bagian pertama buku ini berjudul *Tonargumi dan Kumiai: Lembaga Sosial Baru*. Dalam menjalankan kebijakan sosial ekonomi Jepang yang bertujuan untuk memobilisasi besar-besaran penduduk pedesaan Jawa terbentuklah lembaga-lembaga yang berada pada tingkat masyarakat biasa dan bertujuan untuk menopang kebijakan yang telah dibuat. Dua lembaga sosial yang penting itu adalah *Tonarigumi* (rukun tetangga) dan *Kumiai* (koperasi gaya Jepang). *Tonarigumi* di populerkan pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1944, Jepang membentuk tonarigumi tidak lain untuk mempermudah mereka dalam mengontrol masyarakat Jawa. Tidak hanya memperkenalkan *tonarigumi*, pemerintahan Jepang ikut memasukkan *Tonarigumi* dalam propaganda mereka. Hal ini pula yang menyebabkan *Tonarigumi* sangat cepat di terima oleh masyarakat di seluruh Jawa.

Kutipan 21

“pada jenjang terendah, *tonarigumi* terdiri dari 10 atau 20 rumah tangga dan berlaku untuk memperketat cengkraman pemerintah atas penduduk serta meningkatkan komunikasi dengan mereka.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 209).

Kutipan 22

“dimulai pula kampanye-kampanye propaganda yang di tunjukkan kepada penduduk secara keseluruhan dengan menekankan bahwa *tonarigumi* didasarkan pada semangat gotong royong yang telah lam menjadi tradisi orang Jawa.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 215).

Kutipan 23

“Jumlah total tonarigumi untuk seluruh Jawa adalah 508.745 dan jumlah total rumah tangganya adalah 8.967.320.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 216).

Pada kutipan diatas dapat dilihat bahwa Jepang sangat berambisi untuk mengontrol penuh masyarakat Jawa diberbagai sektor, Lembaga sosial *Tonarigumi* menjadi salah satu senjata utama pemerintahan Jepang dalam mengontrol masyarakat, terbukti dengan sangat cepatnya masyarakat Jawa yang menerima *Tonarigumi* dan munculnya berbagai kampanye. Jepang juga mengeluarkan poster-poster terkait *Tonarigumi* yang bertujuan menarik masyarakat agar mudah dikontrol dan di mobilisasi oleh pemerintah Jepang. Sebelum dijalankan para pejabat keresidenan di perintahkan melatih pangreh praja yang di bawahinya. Pemeritah Jepang juga telah membentuk sebuah model *tonarigumi* di sebuah kabupaten.

Tonarigumi bisa dikatakan sangat sukses dalam mengait hati masyarakat Jawa terbukti dalam kutipan 23 sudah banyak masyarakat yang masuk dalam keanggotaan *Tonarigumi*. Hal ini juga tidak luput dari slogan yang dikeluarkan dalam *Tonarigumi* yakni *Tonarigumi* berlandaskan gotong royong, yang di mana, hal ini sudah mendarah daging dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu.

Kegiatan utama *tonarigumi* memiliki 6 kegiatan utama:

1. Membantu *keibodan* (organisasi keamanan) dalam mempertahankan tanah air dan melawan serangan udara, kebakaran, mata-mata dan penjahat.
2. Memberitahu rakyat mengenai dekret, peraturan, dan petunjuk pemerintahan, serta menyadarkan mereka.
3. Membantu peningkatan produksi dan penyerahan padi serta tanaman lain
4. Mendistribusikan catu barang
5. Bekerja sama dengan pemerintahan militer dalam urusan militer dan menjalankan pelayanan lain
6. Memajukan gotong royong dikalangan penduduk. “Jawa Gunseikanbu, *Jawa Nenkan* 2604,(tokyo 1973), “ hlm 50

Dapat di lihat bahwa secara tidak langsung kegiatan utama yang dijalankan oleh *tonarigumi* membantu Jepang dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mereka yang dilakukan terhadap masyarakat Jawa. Hampir sama seperti kebijakan-kebijakan Jepang lainnya dalam melancarkan propaganda mereka melalui *tonarigumi*, Jepang akan memberika penghargaan serta uang kepada *tonarigumi* yang terbaik.

Kutipan 24

“upaya lain untuk mendorong anggota *tonarigumi* ialah dengan memberikan penghargaan kepada *tonarigumi* “terbaik” yang diberikan oleh masing-masing pemerintahan keresidenann. Upaya pemberian penghargaan diselenggarakan 3 novemeber 1944 di seluruh Jawa, dan bagi yang terpilih diberikan surat penghargaan serta uang”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 223)

Berdasarkan kutipan diatas dapat di gambarkan bagaimanaa Jepang menjalankan propagandanya dengan sangat terampil. Hal ini dibuktikan dengan adanya perlombaan yang secara tidak langsung membuat masing-masing *tonarigumi* melakakukan hal yang terbaik menurut Jepang. *Tonarigumi* yang paling aktif dalam menjalankan perintah Jepang, yang nanti pada akhirnya akan mendapatkan penghargaan serta hadiah dari pemerintah Jepang secara langsung. Jepang mengupayakan berbagai macam sarana demi mewujudkan semangat *tonarigumi* dikalangan masyarakat. Salah satu bukti yang bahwa Jepang sangat mengupayakan *tonarigumi* adalah diadakannya sebuah kongres *Tonarigumi* se Jawa. Soekarno yang pada saat itu merupakan ketua hokokai ikut menyampaikan pidato pada saat acara kongres. Hadirnya soekarno memiliki dampak yang sangat besar bagi terlaksanakannya *Tonarigumi* yang merupakan propaganda Jepang. Lembaga lainnya yang di bentuk oleh Jepang di tingkat desa ialah *Kumiai*. *Kumiai* ini sendiri merupakan sebuah koperasi gaya Jepang. Yang merupakan sebuah misi pengendali ekonomi Jepang di tingkat desa.

Kutipan 25

“*Kumiai* bertindak sebagai unit dasar untuk memanipulasi seluruh struktur perekonomian yang di kendalikan semasa perang”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 228)

Berdasarkan kutipan diatas Jepang menggunakan *kumiai* sebagai sarana untuk mengontrol keuangan yang beredar di masyarakat. Hal ini didukung juga dengan kondisi masyarakat Jawa yang telah aktif dalam koperasi sejak zaman belanda. Perkembangan koperasi pada masa pemerintahan Jepang berkembang sangat cepat, sehingga hal ini bisa dikatakan sukses. *Kumiai* menjalar hampir ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jawa. Hampir sama dengan *tonarigumi* Jepang juga melakukann pelatihan terhadap pejabat desa melalui departemen perindustrian dalam *gunseikanbu*. Dibawah kepemimpinan Moh Hatta dibentuklah sebuah komita yang mengatur koperasi diberbagai sektor seperti pertanianm industri dan niaga. Jepang juga memerintahkan setiap kelompok untuk menyelenggarakan setidaknya satu koperasi sehingga pemerintahan Jepang dapat mengontrol usaha tersebut.

Kutipan 26

“ dengan demikian koperasi di selenggarakan hampir disemua bidang pabrik, pertanianm dan perdagangan di Jawa.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 229)

Berdasarkan kutipan ini, Jepang berhasil menyabotasi hampir semua sektor yang ada di tengah masyarakat Jawa. Penyelenggaraan koperasi disemua sektor berguna untuk mengendalikan keuangan. Masyarakat yang pada saat itu rata-rata berada disektor pertanian dapat dikendalikan dengan mudah oleh Pemerintah Jepang sehingga kontrol yang merupakan salah satu program Jepang dapat mudah terlaksana disektor ekonomi. Dengan ini Jepang dapat mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan oleh wirausaha yang ikut dalam koperasi yang dibuat.

2. Gambaran Pendudukan Jepang Bagian kedua

Pada bagian kedua buku Kuasa Jepang Di Jawa ini berjudul Usaha Propaganda dan Mobilisasi Penduduk. Propaganda merupakan kewajiban pokok dan salah satu yang paling penting dari pemerintahan militer. Bahkan di bentuk sebuah departemen khusus demi melancarkan usaha pemerintah militer Jepang dalam melakukann propaganda di wilayah Indonesia.

Kutipan 27

“oleh karena itu departemen yang paling Independen, *sendenbu* (departemen propaganda) di bentuk didalam badan pemerintahan militer.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 247)

Berdasarkan kutipan diatas Jepang sangat berambisi dalam mempropaganda masyarakat terutama Jawa. Propaganda yang dilakukan Jepang dipimpin langsung di bawah departemen yang independen (*sendenbu*). Hal ini Juga menjadi corak dalam pendudukan pada masa Jepang. Propaganda menjadi kunci utama kesuksesan Jepang dalam menduduki daerah jajahannya.

Departemen ini dibentuk pada Agustus 1942 dan bertanggung Jawab atas propaganda serta mengambil informasi dari pemerintahan sipil. Ketika berdiri *sendenbu* tidak hanya bertindak sebagai kantor administratif, akan tetapi langsung menjalankan operasi propaganda. *Sendenbu* ini memiliki tujuan untuk mempromosikan kesenian tradisional Indonesia serta menyebarkan kebudayaan Jepang. *Sendenbu* memiliki tujuan dan kewajiban, di mana organisasi ini bisa dibilang menjalankan propogandanya hampir di seluruh aspek. Propaganda yang dilakukan oleh Jepang dilakukan bersamaan dengan menampilkan kesenian khas indonesia. Hal ini bertujuan menarik simpati rakyat, karena Jepang juga ikut menampilkan kesenian tradisional walaupun bisa di katakan tujuan utamanya adalah untuk menampilkan serta menyebarkan kesenian khas Jepang itu sendiri, seperti kutipan dibawah ini.

Kutipan 28

“tujuan dan kewajiban utama organisasi ini ialah mempromosikan kesenian tradisional indonesia, memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Jepang serta mendidik dan melatih seniman Indonesia.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 249)

Departemen ini memiliki beberapa seksi dalam melakukann propagandanya dan setiap seksi memiliki seorang pemimpin yang merupakan warga Indonesia. Pemerintahan militer mengambil perhatian utama yaitu bagaimanaa mereka mengembangkan jaringan propaganda ini hingga sampai ke setiap lapisan masyarakat desa.

Demi melancarkan propagandanya pemerintah menggunakan berbagai macam media. Sama seperti ketika menyebarkan slogan gerakan 3A Jepang menggunakan berbagai media dalam menyebarkannya. *Sendenbu* juga melakukann hal yang sama ketika awal kedatangan Jepang. Semua media yang biasa dilihat dan digunakan masyarakat Jawa ikut digunakan dalam menyebarkan propaganda pemerintahan Jepang. Hal ini terlihat dalam kutipan buku Aiko Kurasawa berikut.

Kutipan 29

“untuk melaksanakan skema propaganda ini ke dalam operasi digunakan berbagai macam media seperti surat kabar, pamflet, buku, poster, foto, siaran radio, pameran, pidato, drama ,seni pertunjukan tradisional, pertunjukan gambar kertas (*kamishibai*), musik, dan film.” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 255-256)

Penggunaan media yang positif menjadi ciri utama dari propaganda Jepang. Hal ini akan mengusik “pendengaran dan pengelihatan” (audiovisual) masyarakat pedesaan. Media yang paling di tonjolkan dalam propaganda Jepang adalah film, seni panggung, *kamishibai*, dan musik. Setelah media di tentukan pemerintah militer mengirim para propagandis ke setiap desa dan melakukann pertunjukannya.

Kutipan 30

“metode yang paling sering mereka gunakan ialah mengirim kelompok-kelompok propagandis dengan proyektor film, musisi, operator *kamishibaii*, dan aktor yang berpindah dari satu desa ke desa lain”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 256-257)

Berdasarkan kutipan diatas Jepang memilih mengirimkan kelompok-kelompok yang disebut propagandis. Pengiriman propagandis secara berkelompok bertujuan untuk mempermudah mengaplikasikan media propaganda. Media propaganda yang di bawah setiap kelompok cukup banyak. Setiap orang memiliki tugas tersendiri dalam melakukann propagandanya.

Kutipan 31

Film-film yang di pertontonkan memiliki kategori diantaranya adalah;

1. Film yang menekankan persahabantan antara bangsa Jepang dan bangsa-bangsa Asia serta peran pengajaran Jepang.
2. Film yang mendorong pemujaan patriotisme dan pengabdian terhadap bangsa.
3. Film yang melukiskan operasi militer dan menekankan kekuatan militer Jepang.
4. Film yang menekankan kejahatan bangsa Barat,

5. Film yang menekankan moral berdasarkan nilai-nilai Jepang seperti pengorbanan diri, kasih sayang ibu, penghormatan terhadap orang-orang tua, persahabatan yang tulus, sikap kewanitaan, kerajinan, dan kesetiaan
6. Film yang menekankan peningkatan produksi dan kampanye perang lainnya. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 259)

Berdasarkan kategori film yang disebutkan diatas terlihat jelas bahwa film menjadi salah satu media yang di prioritaskan cukup tinggi oleh pemerintah militer untuk di berikan kepada masyarakat. Film yang paling sering di siarkan adalah film dokumenter, kebudayaan dan film berita. Secara garis besar film yang di ditampilkan merupakan kampanye-kampanye yang menunjukkan bahwa Pemerintah militer bekerja untuk Masyarakat. Film-film tersebut di tayangkan melalui biokop-bioskop yang tersebar di Jawa.

Selain film, drama juga menjadi alat propaganda yang digunakan. Kedatangan Jepang merupakan pembawa sejarah teater di Indonesia. Selain beberapa alat diatas Jepang juga menggunakan kesenian tradisional Jawa seperti wayang dalam menyampaikan propagandanya dan pemerintahan mengubah alur cerita perwayangan tersebut menjadi cerita mengenai perang dan perlawanan militer. Dalang juga diatur oleh pemerintahan sehingga dapat bermain lidah dengan mengutarakan kebijakan dan keinginan pemerintah. Masih banyak alat propaganda yang di gunakan oleh Jepang seperti radio, nyanyian serta tarian yang merupakan cara cepat agar propaganda yang di sampaikan Jepang dapat di dengar hingga semua lapisan masyarakat pedesaan. Selain semua media yang sudah disebutkan diatas, bagi Jepang pers dan wartawan menjadi bagian yang sangat penting. Mereka memiliki tugas untuk menyiarkan propaganda melalui media cetak dan memberikan informasi tertulis yang dapat di baca seluruh khalayak umum secara terus menerus. Sehingga memiliki pengaruh yang lebih intensif dan efektif.

Pada bab kedua bagian kedua menggambarkan bagaimana Jepang memobilisasi serta mendoktrinasi para Kiai yang ada di pedesaan. Berbeda dengan propaganda, Jepang menganggap Islam sebagai sebuah ideologi yang bertentangan dengan kebudayaan Barat dengan perang Suci Islam melawan Kristen.

Kutipan 32

“Kebijakan Jepang terhadap Islam selalu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari “operasi propaganda dan penjinakan” (*senbu kosaku*). Mereka memandang agama sebagai sebuah alat penting untuk memanipulasi pikiran rakyat dan mereka menaruh perhatian khusus terhadap peran para pemimpin Islam”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 304

Berdasarkan kutipan diatas Jepang memiliki Perhatian besar terhadap Islam terbukti dengan dibentuknya sebuah departemen independen yakni *shumubu* atau kantor oeroesan Agama didalam pemerintahan militer guna menangani permasalahan-permasalahan agama. Kegiatan *shumubu* ini awalnya di fokuskan pada penelitian dan persiapan, di mana pada tahap awal Jepang menunggu dan belajar tentang Islam. Pada tahun 1942 akhir pemerintah mulai gencar terhadap Islam di Jawa.

Perhatian Jepang terhadap Islam tidak berhenti disana, selama masa kolonial belanda, mereka tidak pernah mengundang para ulama. Pada masa pendudukan Jepang panglima yang pada saat itu menjabat mengundang para ulama untuk bertemu secara langsung. Hal ini tidak lain dilakukan oleh Jepang demi memperlancar propagandanya. Selain itu Jepang juga menganggap Islam merupakan agama yang penting untuk mempromosikan propagandanya. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut.

Kutipan 33

“Panglima Tertinggi Angkatan Darat ke-16 mengundang 32 ulama terkemuka di seluruh Jawa dan bertatap muka dengan mereka”.(Aiko Kurasawa, 2015, hlm 309)

Hal ini merupakan pertama kali sejak kedatangan kolonial di mana pemerintah pusat melakukann kontak langsung dengan para ulama di daerah dan merupakan kejadian simbolis yang menandai mulainya kebijakan Jepang. Hal pertama yang dilakukan ketika kebijakan ini dilakukan perubahan struktur pada *Shumubu*, di mana para personel dari *shumubu* ini langsung di pimpin para ulama. *Shumubu* membentuk sebuah seksi baru bernama seksi agama yang berfungsi untuk mengontrol para ulama.

Seksi Agama (*shumuka*) dibentuk guna mengontrol masyarakat di tingkat keresidenan. *Shumuka* dipimpin langsung oleh para ulama sebagai salah satu tindak keseriusan Jepang dalam mengontrol masyarakat di tingkat keresidenan. Hal ini dinilai efektif karena masyarakat Jawa sangat terikat dengan Agama terutama Islam. Tapi dalam pembentukan *shumuka* nyatanya tidak hanya untuk agama islam saja, propaganda juga tidak luput akan hal itu, seperti diaturnya para ulama untuk meninggikan pemerintahan militer. Seperti yang di kutip dalam buku Aiko Kurasawa dibawah ini.

Kutipan 34

“Salah satu tindakan untuk mengembangkan kontrol yang efektif terhadap ulama Islam ialah didirikannya seksi agama, yaitu *Shumuka* di kantor-kantor keresidenan pada April 1944”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 316)

Kutipan 35

Dari terbentuknya *shumuka* ini dapat di rumuskan enam tugas ulama yakni:

1. Untuk meningkatkan bimbingan dan propaganda terhadap umat islam.
2. Untuk pemererat hubungan antara pangreh praja dan alim ulama.
3. Untuk mengaktifkan alim ulama supaya bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang
4. Untuk mengarahkan dan mengendalikan penghulu

5. Bahasa Jepang dan pengetahuan umum harus di ajarkan di sekolah-sekolah agama
6. Untuk menyeleksi siswa yang di latih sebagai alim ulama. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 317)

Berdasarkan kutipan diatas tujuan utama dalam terbentuknya *shumuka* terdapat dalam tiga point pertama, yang artinya Jepang menggunakan para Kiai di pedesaan sebagai sarana dalam melakukann porpagandanya. Sehingga menyebabkan peran Kiai di pedesaan menjadi berubah yang awalnya menyebarkan agama islam menjadi menyebarkan tentang keinginan Jepang dikalangan rakyat. Jepang juga mempengaruhi pandangan rakyat melalui seringnya hubungan masyarakat dengan kiai di tempat latihan. Selain itu Jepang beruhasan memanfaatkan kiai sbgai perantara komunikasi antara pemerintah dan rakyat.

Disamping rekayasa indoktrinasi dan manipulasi massa melalui media propaganda dan melalui para pemimpin desa serta ulama, pemerintahan militer Jepang juga berusaha menjangkau penduduk pedesaan dengan cara langsung. Pemerintah Jepang melakukann pengorganisasian masyarakat ke dalam organisasi-organisasi sekaligus mengajar dan melatih mereka guna kepentingan perang Jepang. Dalam bab ketiga bagian kedua ini menggambarkan bagaimanaa usaha Jepang dalam memobilisasi masa sampai akhirnya mengubah mentalitas sebaaian penduduk pedesaan.

Kutipan 36

“salah satu program penting yang dilakukan Jepang dalam mengindoktrinasi dan memobilisasi penduduk pada tingkat masyarakat bawah terlihat dari pembentukan *seinendan* (barisan pemuda)”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 373)

Dalam kutipan diatas dapat di lihat bahwa Jepang tidak melepaskan pandangannya. Jepang memperhatikan hampir seluruh lapisan masyarakat salah satunya masyarakat bawah. Pembentukan *seinendan* bertujuan untuk melayani pembentukan Asia Timur raya. Sasaran dan semangat *seinendan* secara lengkap di ungkapkan dalam pedoman *Seinendan*. Para anggota *seinendan* berasal dari kalangan pribumi dengan rentan usia 14 dan 25 tahun. Fungsi pokok *seinendan* adalah untuk melatih dan membilisasikan anggota-anggotanya dalam berbagai kegiatan dengan bermacam-macam tujuan.

Kutipan 37

Berikut ini tujuan dibentuknya *Seinendan* diantaranya:

- i. Latihan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, serta olahraga, dan sebagainya.
- ii. Kegiatan-kegiatan sukarela untuk kepentingan umu seperti pembersihan jalan, pembangunan irigasi dan infrastruktu lainnya, serta transportasi.
- iii. Peningkatan semangat kerja
- iv. Latihan dalam berbagai keahlian (kejuruan).
- v. Meningkatkan berbagai industri dan peningkatkan produksi.
- vi. Pencegahan serangan udara dan kebakaran

- vii. Latihan memobilisasikan tenaga manusia dalam keadaan darurat. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 387-388)

Berdasarkan tujuan di atas terbentuknya *seinendan* bukan untuk membantu Jepang mempertahankan tanah air, hal ini terlihat dari tidak adanya latihan militer yang di kerjakan oleh para pemuda di *seinendan*. Dengan kata lain *seinendan* dibentuk bukan untuk tujuan berperang, melainkan untuk melatih masyarakat.

Selain *seinendan* Jepang juga membentuk *keibodan* (organisasi keamanan) yang pada dasarnya merupakan organisasi keamanan di bawah kontrol departemen kepolisian dan berfungsi membantu kepolisian dalam menjaga keamanan. Terbentuknya *keibodan* bertujuan untuk membersihkan elemen-elemen anti Jepang yang beredar di masyarakat serta mencegah bahaya yang di timbulkan oleh musuh.

Kutipan 38

“secara ringkas, *keibodan* dimaksudkan untuk menenyapkan elemen-elemen anti-Jepang dari masyarakat”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 388)

Dengan tujuan *Keibodan* tersebut, para anggotanya diberi pelatihan untuk menyelidiki berita buruk yang beredar di masyarakat, mencari penjahat serta melakukan ronda malam. Semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota *Keibodan* hampir sama persis dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh polisi. Setiap anggotanya juga diberi pelatihan untuk menyelamatkan masyarakat jika terjadi bencana alam. Kehadiran organisasi *Keibodan* ini tidak sepenuhnya diterima baik oleh masyarakat.

Kutipan 39

“secara umum, sebagian besar penduduk desa tidak menyukai kehadiran *keibodan*”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 392)

Ketidak sukaan penduduk pedesaan terhadap kehadiran *keibodan* menyebabkan para anggota dari *keibodan* ini sendiri sering di takuti dan tidak di sukai meskipun ketika pembentukannya sering melibatkan masyarakat secara tajam. Selain itu sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para anggota *keibodan* sehingga menyebabkan ketidaksukaan masyarakat makin besar.

Pembentukan dua organisasi *Seinendan* dan *Keibodan* yang masing-masingnya memiliki lebih 1 juta anggota, menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi pengerahan pemuda secara besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang terhadap pemuda-pemuda Indonesia. Hal seperti ini tentu sebelumnya tidak pernah terjadi pada masa Hindia Belanda. Tidak sampai disitu, mobilisasi massa yang dilakukan oleh Jepang tidak hanya sebatas *Seinendan* dan *Keibodan*. Masih ada organisasi lainnya seperti *Jawa Hokokai*. Tidak hanya pengerahan tenaga laki-laki, mobilisasi ini juga melibatkan tenaga wanita, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya *Funjinkai* (Perkumpulan Wanita) pada tahun 1943. Organisasi penting lainnya yang di bentuk dalam melaksanakan mobilisasinya adalah *Jawa hokokai* (Himpunan kebaktian rakyat). *Jawa hokokai* adalah suatu organisasi massa yang menyatukan seluruh penduduk sebagai anggotanya. Dalam pelaksanaannya masyarakat

banyak tidak mengetahui bahwa mereka juga termasuk keanggotaan *hokokai*. Tujuan dasar dai *hokokai* ini sendiri adalah untuk mendorong rakyat berbakti dan mengabdikan dirinya sendiri kepada bangsa.

Di pedesaan *hokokai* merupakan sarana pemerintahan Jepang dalam mengontrol masyarakat. Selain organisasi pemerintah Jepang juga memanfaatkan pendidikan dalam mengindoktrinasi massa.

Kutipan 40

“pendidikan sekolah terutama sekolah dasar, merupakan salah satu aspek yang di dimanfaatkan oleh pemerintah militer Jepang sebagai sarana untuk mengindoktrinasi massa”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 399)

Berdasarkan kutipan diatas Pemerintahan Jepang kembali membuka sekolah-sekolah pribumi dan menutup sekolah-sekolah bekas pendidikan barat. Dengan ini Jepang menghapuskan dualisme pendidikan sekolah barat dan pribumi. Jepang mengeluarkan undang-undang yang di mana mengizinkan dibukannya kembali sekolah-sekolah pribumi. Masa pemerintahan Jepang sekolah dasar diubah menjadi enam tahun dan bukan lima tahun seperti zaman belanda, akibat pemberlakuan itu jumlah sekolah dan jumlah siswa meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Kutipan 41

“rata-rata jumlah murid persekolah yang berjumlah 113 pada 1940 meningkat menjadi 178 pada 1944 atau mengalami peningkatan 60%”.(Aiko Kurasawa, 2015, hlm 402)

Kenaikan jumlah murid dan siswa ini karena biaya pendidikan yang lebih murah dibandingkan pada zaman Belanda. Selain biaya dorongan pemerintahan Jepang juga menjadi latar belakang kenaikan jumlah murid maupun sekolah, hal ini karena adanya kepentingan yang nyata apabila masyarakatnya berpendidikan. Akibatnya kebijakan Jepang ini merangsang para penduduk desa untuk lebih memperhatikan pendidikan dan akibat tekanan dari pemimpin desa semakin banyak para orang tua mulai menyekolahkan anak-anak mereka. Dalam mengindoktrinasi anak-anak Jepang memiliki empat pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan Jepang yakni latihan kemiliteran (*kyoren*) pelajaran moral (*shushin*) pekerjaan praktis (*sagyō*) dan bahasa Jepang itu sendiri. Selain empat pembelajar itu Jepang juga mewajibkan pembelajaran jasmani. Ketika akhir masa pendudukan Jepang minat dan ketertarikan terhadap pendidikan harus terhenti karena faktor ekonomi dan murid yang *drop out*.

3. Gambaran pendudukan Jepang bagian ketiga

Bagian terakhir dalam buku Aiko Kurasawa ini berjudul Masyarakat Desa Terguncang, di mana pada bab ini secara ringkas membahas dampak dari pendudukan Jepang. Bab pertama bagaian ketiga menggambarkan tentang bagaimana perubahan atau transformasi Pangreh Praja. Dualisme pemerintahan daerah yang terjadi pada masa Pemerintahan Belanda, dihapuskan pada masa Jepang. Pemerintah Jepang pada saat itu membentuk Pangreh Praja untuk memobilisasi masyarakat.

Kutipan 42

“apapun sikap Jepang terhadap pangreh praja, peran pangreh praja dalam memobilisasi sumber daya sangat di perluas karena adanya beberapa faktor”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 440)

Pangreh Praja yang dibentuk oleh Belanda memiliki kekuasaan yang besar terhadap vis-à-vis rakyat, kontrol pemerintah pusat sangat mengikat mereka pada saat itu. Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang, Pangreh Praja kehilangan kepercayaan masyarakat. Perlawanan rakyat pada Pangreh Praja sempat terjadi karena kekecewaan rakyat terhadap gambaran kebangsawanan Pangreh Praja. Disisi lain, dengan mobilisasi Jepang, rakyat kecil menjadi lebih sadar politik dan kepercayaan diri. Antara rakyat dan Pangreh Praja menjadi lebih seimbang dengan berubahannya julukan Pangreh Praja (penguasa negara) menjadi Pamong Praja. Buku ini tidak hanya menggambarkan perubahan Pangreh Praja. Perubahan Kepala Desa masa pendudukan Jepang juga digambarkan dalam buku ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa lebih banyak membantu tugas pemerintahan militer Jepang. Hal ini terlihat dalam kutipan dibawah.

Kutipan 43

“jelas bahwa Jepang secara tersurat mensyaratkan bahwa *kucho* haruslah seorang yang dapat menjalankan tugas-tugas pemerintah militer Jepang” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 486).

Tugas-tugas yang akan dijalankan oleh Kepala Desa sudah ditegaskan oleh Jepang secara tersurat. Kepala Desa diberikan keyakinan terhadap kesetiaan mereka pada pemerintahan militer. Berbagai kualifikasi pun juga diberikan oleh Jepang terhadap Kepala Desa. Selain kecakapan mereka dalam bidang administratif serta berpendidikan, pihak yang menjadi Kepala Desa hendaknya lebih muda, sehingga memiliki kekuatan fisik yang kuat.

Kutipan 44

“*kucho* harus muda dan kuat secara fisik..”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 486).

Kualifikasi untuk memiliki fisik yang kuat ini menjadi poin penting yang harus dipenuhi seorang *kucho*, hal ini karena dalam tugasnya mereka harus berjalan mengelilingi desa untuk memerintah dan menunjukkan contoh kepada masyarakat desa yang sedang bekerja. Selain itu, para *Kucho* ini terkadang harus mengikuti latihan militer untuk memimpin *Seinendan* dan *Keibodan*.

Semua kebijakan yang telah dilakukan Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia seperti wajib serah padi, perekrutan romusha, pemerkosaan, penjarahan, kontrol ekonomi secara ketat dan kebrutalan *kenpeitai*, telah membuat penduduk desa menjadi korban karena harus memenuhi kekuatan fisik dan material yang dibutuhkan oleh Jepang. Semua kebijakan tersebut juga menimbulkan pemberontakan dari masyarakat. Salah satu pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan yang dilakukan para petani diberbagai

daerah. Salah satunya pemberontakan petani yang terjadi di Indramayu (Kaplongan, Sindang dan Lohbener, serta Bugis). Pemberontakan yang awalnya terjadi di Indramayu pertama terjadi di desa Kaplongan lalu menyebar ke daerah-daerah lainnya di Indramayu. Pemberontakan terjadi karena penyerahan padi yang tidak masuk akal di daerah itu.

Kutipan 45

“Di desa-desa indramayu, petani diperintahkan untuk menyerahkan kuota padi perhektar sangat tinggi” (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 520).

Seperti yang digambarkan Aiko dalam bukunya ini, pemerintah memeras para petani hingga menyebabkan para petani tidak memiliki cadangan beras sama sekali. Setelah mengumpulkan beras dari para petani pemerintah juga mengurangi cadangan beras yang seharusnya 20 sampai 25 kilogram menjadi 10 kilogram saja. Hal ini yang menyebabkan muncul gelombang protes pertama berskala besar.

Di Kaplongan pemberontakan terjadi karena para petani diwajibkan menyerahkan padi cadangan mereka sehingga banya petani yang menggerutu serta tidak setuju akan peraturan itu. hari Jumat jumat menjadi puncak pemberontakan petani di kaplongan, hal ini terjadi ketika para petani yang di paksa untuk terus bekerja ketika mereka ingin melaksanakan sholat Jumat. Para petani geram lalu memukulu utusan pemerintah yang tengah mengatur jalannya pemerintah penyerahan padi itu, 1 orang pingsan dan dua polisi tewas dalam pemberontakan ini. Hari berikutnya datang tentara Jepang bersama polisi indonesia untuk menghentikan perlawanan, tetapi para petani terus melakukann perlawanan sehingga tentara Jepang menembaki mereka dan beberapa petani gugur.

Kutipan 46

“petani mulai menyerang dengan segala jenis senjata yang tersedia, termasuk batu-batu, bata , bambu runcing dan golok. Tentara Jepang mulai menembaki”. (Aiko Kurasawa, 2015, hlm 524)

Dengan adanya pemberontakan petani di Indramayu pada tahun 1944 terlihat bahwa banyak sekali kejadian-kejadian serta peraturan-peraturan yang merugikan masyarakat pedesaan terutama para petani. Penyebab utama dari pemberontakan petani adalah wajib serah padi. Kerusuhan yang dilakukan oleh para petani menyebabkan administrasi pemerintahan yang normal di daerah harus terhenti untuk sementara waktu. Tidak hanya di Indramayu pemberontakan juga terjadi di daerah lainnya seperti Tasikmalaya dan Banten.

KESIMPULAN

Buku Aiko kurasawa berjudul Kuasa Jepang di Jawa terdiri dari tiga bagian yang masing-masing bagian terdiri dari 4, 3, dan 3 bab. Pada bab pertama berjudul Dampak Kebijakan Jepang terhadap Desa menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang mempengaruhi pedesaan. Kebijakan terhadap pertanian menjadi inti dari bab 1 bagian pertama ini, di mana Jepang memperkenalkan bibit-bibit baru serta inovasi dalam teknik penanaman. Propaganda terhadap pertanian Juga tidak luput dari cengkraman pemerintahan militer Jepang. tanaman-tanaman jenis baru juga diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang seperti Kapas, Yute-rosela, rami dan Tanaman jarak. Jepang juga mengeluarkan Kebijakan terhadap gula sehingga mempengaruhi kehidupan para petani saat itu. Kebijakan yang paling dirasakan oleh penduduk desa adalah Wajib Serah Padi. Kebijakan ini mewajibkan para petani untuk menyetorkan beras sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu. kemiskinan dan penderitaan tidak dapat di lepaskan akibat dari kebijakan Wajib Serah Padi ini.

Selain itu para romusha juga di latih agar lebih terampil dan bertujuan untuk keberhasilan Jepang dalam mobilisasi. Jepang juga membentuk lembaga sosial baru untuk mengendalikan massa seperti tonarigumi dan kumiai. Pembentukan lembaga sosial ini untuk memperlancar propaganda Jepang dan mobilisasi penduduk di tingkat desa. Dalam melakukann propaganda Jepang menggunakan media seperti film, musik, seni tari, dan berbagai macam media audio visual lainnya. Selain media Jepang juga membentuk organisasi propaganda lokal, hal ini bertujuan untuk memperlancar propagandanya di pedesaan. Para kiai juga tidak luput dalam usaha Jepang melaksanakan propagandanya. Agama islam memiliki sedikit perbedaan dalam usaha propagandanya. Ketiga organisasi ini berperan penting dalam memobilisasi masyarakat pedesaan. Selain organisasi bidang pendidikan juga menjadi salah satu peran dalam memobilisasi terutama murid dan pendidik. Jepang mewajibkan pelajaran yang berkaitan dengan propaganda seperti bahasa Jepang menjadi pelajaran wajib di sekolah. Selain itu dilakukan pelatihan terhadap pendidik agar memperlancar Jepang dalam memobilisasi di bidang pendidikan. Akibat-akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan militer Jepang mulai terjadi banyak pengaruh di pedesaan. Pangreh praja mengalami perubahan yang cukup signifikan, peran pangreh praja menjadi lebih besar serta penghapusan dualisme pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiko Kurasawa, 2015. *KUASA JEPANG DI JAWA Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*. Depok: Komunitas Bambu
- Aiko kurasawa, Mobilisasi dan control: Studi tentang perubahan sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945 (Jakarta: Grasindo, 1993)
- Atar, Semi. 1984. *Anatomi Sastra*. Padang: Sridharma
- Hugiono dan P.K. Poerwantana. 1992. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : PT Rineka
- Mestika, Zed. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1996.
- Kahin, Audrey. 1979. *Perjuangan Kemerdekaan: Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Sardiman AM. 2004. *Mengenal Sejarah*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing
- Umar, Muin. 1988. *Historiografi Islam*. Jakarta : CV. RaJawali
- Yatim, Badri. 1997. *Historiografi Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- W. Poespopronjo. 1987. *Subyektifitas Dalam Historiografi*. Bandung : Remadja Kary
- Denik kharisma Sari, Prof. Nawiyanto, “Kebijakan Ekonomi Jepang Di Blitar Tahun 1942-1945”, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember (UNEJ)
- Elicabeth, Francisca, 2010. *berjudull Realita Jugun Ianfu Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945 di Indonesia (Daerah Telawang Kalimantan Selatan)*, (Skripsi USU, Medan).
- Eny Nopi Yanti. 2011. *Pendudukan Jepang di Jawa Barat tahun 1942-1945*. (skripsi univeraitas Jember)
- Juliandro Ilyas. 2018 *Jugun Ianfu Masa Pendudukan Jepang dalam Dua Karya Novel Studi Historiografi* (Skripsi UNP, Padang)
- Yasrina Ayu, 2002. *Tindakan Kekerasan Jepang dalam Beberapa Novel Indonesia*, (Skripsi UNP, Padang)